

KETERSEDIAAN FASILITAS KOTA BERDASARKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN BOALEMO

Irwan Wunarlan

²Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. B.J. Habiebie Desa Moutong Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango
E-mail: irwan.wunarlan@ung.ac.id

Abstrak

Dalam kurun 2010-2021, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Boalemo adalah 0,60 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,03% per tahun. Kondisi ini menunjukkan kegiatan ekonomi Boalemo sangat baik. pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi membutuhkan ruang dan infrastruktur kota. Penyediaan infrastruktur publik di kota ini adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah kota atau swasta yang dipercayakan oleh pemerintah untuk menyediakan dan mengelolanya. Keberadaan infrastruktur kota baik dari segi kuantitas dan layanan harus proporsional dengan populasi kota. karena itu, diperlukan studi tentang pertumbuhan penduduk terhadap kebutuhan dan ketersediaan fasilitas kota sehingga seluruh masyarakat dapat dilayani dengan prima. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian ketersediaan dan kebutuhan untuk infrastruktur atau fasilitas umum kota tidak seimbang, ketersediaan fasilitas pendidikan (sekolah), fasilitas ekonomi (pasar, bank, KUD, hotel dan restoran), dan agama fasilitas (masjid, gereja dan kuil-kuil) sudah melebihi tingkat permintaan fasilitas sehingga penambahan atau pembangunan fasilitas baru akan menyebabkan pemborosan anggaran dan tingkat penggunaan atau pemanfaatan akan kurang optimal. Pemerintah Kabupaten Boalemo harus memperhatikan dan memperbaiki infrastruktur transportasi sehingga fasilitas ini dapat orang akses ke fasilitas umum dan ruang kota

Kata Kunci: infrastruktur; kota; penduduk; Boalemo

Abstract

In the 2010-2021 period, the population growth rate of Boalemo Regency was 0.60 percent and economic growth was 2.03% per year. This condition shows that Boalemo's economic activities are outstanding. Population growth and economic activity require city space and infrastructure. Providing public infrastructure in this city is the duty and responsibility of the city government or the private sector entrusted by the government to provide and manage it. The existence of city infrastructure both in terms of quantity and services must be proportional to the city population. Therefore, it is necessary to study population growth regarding the needs and availability of city facilities so that the entire community can be served optimally. In this research, the analytical tool used is simple linear regression. The results of the research are that the availability and need for infrastructure or public facilities in the city are unbalanced, the availability of educational facilities (schools), economic facilities (markets, banks, KUDs, hotels, and restaurants), and religious facilities (mosques, churches, and temples) have exceeded the level of demand for facilities so that the addition or construction of new facilities will cause a waste of budget and the level of use or utilization will be less than optimal. The Boalemo Regency Government must pay attention to and improve transportation infrastructure so that people can access these facilities to public facilities and city spaces.

Keywords: infrastructure; city; population; Boalemo

A. PENDAHULUAN

Boalemo merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Gorontalo. Terletak di wilayah bagian Tengah dari provinsi Gorontalo dengan luas wilayah 1.831,33 km² dan memiliki jumlah penduduk sebesar 147.038 jiwa. Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mencapai 0,60% sedang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boalemo

mencapai 2,03% (BPS, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Boalemo memiliki aktivitas ekonomi yang sangat baik dan sangat dinamis.

Sarana atau infrastruktur berperan sebagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat luas yang penyediaannya dilakukan secara serentak atau massal. Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Penyediaan infrastruktur publik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder (Sadyohutomo, 2008). Penyediaan infrastruktur kota merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kota (*city government*) ataupun masyarakat (*private*) yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menyediakan serta mengelolanya. Keberadaan infrastruktur kota dimaksudkan untuk menunjang aktivitas masyarakat kota yang mobile. Keberadaan infrastruktur kota baik dari segi jumlah maupun pelayanan harus proporsional dengan jumlah penduduk kota.

Infrastruktur kota seyogyanya mampu memberikan jangkauan pelayanan kepada seluruh masyarakat kota baik ditengah kota (*core*) hingga pinggiran kota (*peripheral*). Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian tentang pertumbuhan pendudukan dengan kebutuhan dan ketersediaan fasilitas kota sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani. Disamping itu, keberadaan infrastruktur kota atau fasilitas kota di suatu wilayah, jumlahnya sedapat mungkin tidak *overcapacity* sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terjadi pemborosan sumber daya. Jadi diperlukan suatu perencanaan yang matang dalam pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi penempatan anggaran yang mubazir.

Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk adalah individu ataupun komunal yang menempati suatu wilayah atau wadah di bumi yang memiliki aturan, norma dan hukum serta saling berinteraksi dengan lingkungannya baik mikro maupun makro melalui aktivitas sosial, ekonomi dan budaya dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan. Jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah cukup fluktuatif akibat adanya fertelitas, mortalitas dan migrasi. Pertumbuhan penduduk seringkali dikaitkan dengan perkembangan kota. Karena salah satu indikator ukuran suatu kota dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mendiami kota. Penduduk kota sangat beragam (*plural*) baik etnis, ras dan agamanya sehingga memberikan warna bagi kehidupan sosial budaya masyarakat perkotaan.

Pluralisasi penduduk Indonesia, pada hakekatnya menjadi faktor pendorong bagi berlangsungnya proses integrasi dan indonesianisasi di Indonesia. Proses ini berlangsung tidak hanya melalui kegiatan dalam segi-segi administrasi dan politik pemerintahan dan pekeonomian, tetapi juga melalui proses interaksi sosial dan budaya. Di lain pihak kota diperhadapkan pada persoalan yang cukup rumit seperti pertumbuhan penduduk, penggunaan tanah dan pemanfaatan lahan, permukiman, penyediaan fasilitas dan utilitas kota seperti, air bersih dan sanitasi, serta listrik. Isu-isu ini mengundang tuntutan perbaikan dari kebijakan dari pihak pemerintah (Suryo, 2004).

Pengertian Kota dan Kota Kecil

Gallion dan Eisner (1980) mendefinisikan kota sebagai tempat terkonsentrasinya masyarakat dalam suatu wilayah atau tempat yang secara geografis dapat menampung aktivitas sosial ekonomi penghuninya secara permanen. Menurut Rondinelli (1983) dan Jayadinata (1999) sebagaimana dirujuk Nasution, dkk (2014) definisi kota kecil dapat diperoleh dengan mengetahui ukuran atau dimensi kota. Berdasarkan ukuran kependudukan, kota kecil merupakan kota dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 100.000 jiwa. Sementara, kota kecil di Indonesia adalah kota yang memenuhi kriteria jumlah penduduk antara 50.000 hingga 100.000 jiwa jika berada pada Pulau Jawa atau 20.000 hingga 100.000 jiwa jika berada diluar Pulau Jawa. Selain dari segi jumlah penduduk menyebutkan karakteristik kota kecil adalah tingginya proporsi mata pencaharian penduduk pada sektor pertanian, dan sektor lain yang masih berkaitan dengan sektor pertanian seperti kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Perkembangan Kota

Awalnya kota tumbuh dan berkembang karena adanya pengaruh dari kekuatan urban yang tumbuh dipedesaan akibat adanya dampak revolusi industri dan aglomerasi dipedesaan yang menciptakan perkembangan jasa-jasa sehingga menimbulkan kondisi perkotaan yaitu dengan ciri kehidupannya non pertanian yang tumbuh dalam sejarah perkembangan pedesaan (Soetomo, 2009).

Semakin besar suatu kota, semakin tinggi pula interaksi manusia. Konsekuensi dari karakteristik dari masyarakat komunal atau berkumpul adalah besarnya kebutuhan akan infrastruktur untuk menunjang aktivitas masyarakat komunal (Karyono, 2013). Kota secara fisik terus mengamali perkembangan dan melebar kearah pinggiran kota. Ekspansi perkembangan kota ke daerah pinggiran kota (*urban sprawl*) terkadang dibarengi dengan mengkonversi lahan pertanian ke lahan non pertanian atau mengubah jenis tutupan lahan alami ke tutupan lahan artificial. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan demografi yang sangat cepat (Kuffer, 2013). Pola *urban sprawl* yang umum terjadi adalah pola lompatan katak atau leap frog yang menuntut perpanjangan fasilitas publik (Yunus, 2008).

Agar tujuan pembangunan dan perkembangan kota dapat memberikan dukungan atas aktivitas kehidupan manusia terutama kehidupan sosial dan ekonomi maka perencana kota perlu memperhatikan aspek-aspek kebutuhan dan masalah ekonomi, kependudukan, transportasi, lingkungan, infrastruktur kota, pendidikan, perumahan dan bangunan umum, nilai estetika, administrasi dan hukum serta analisis biaya dan modal (Irwan, 2008), tata guna lahan serta iklim (Clarke, Hoppen, and Gaydos, 1995; Ernawi, 2010). Hal tersebut sangat penting, oleh Karena aspek-aspek tersebut merupakan pembentuk ciri-ciri kota yang terdiri dari bangunan, pola jalan, tata guna tanah, ruang terbuka dan garis langit. Kelima aspek tersebut memiliki keterkaitan dan saling berinteraksi dengan aktivitas manusia yang menempatnya (Heryanto, 2011).

Infrastruktur Kota

Infrastruktur adalah unsur penting dalam suatu kawasan karena menunjang fungsional kawasan perkotaan dan pedesaan. Kegiatan fungsional kawasan perkotaan adalah kegiatan ekonomi dan jasa serta unsur-unsur penunjangnya sedang kegiatan

fungsional kawasan perdesaan adalah kegiatan pertanian dan unsur-unsur penunjangnya (Pamekas, 2013).

Infrastruktur perkotaan meliputi prasarana dan sarana berbagai jenis, yaitu jalan, listrik, air minum, drainase, sanitasi, manajemen persampahan dan pasar (sering dimasukkan sebagai kelompok prasarana perkotaan). Pembangunan infrastruktur perkotaan seharusnya dilakukan secara terintegrasi (Adisasmita, 2015). Adapun yang termasuk sarana perkotaan yakni sarana pemerintahan dan pelayanan air minum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perdagangan dan niaga, fasilitas kebudayaan dan rekreasi, fasilitas ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga. Pembangunan *urban infrastructure* seyogyanya memperhatikan kemudahan akses dan optimalisasi pemanfaatan serta pelayanan sehingga dapat meningkat dan mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya (Rukmana, 2002; SNI 03-1733-2004).

Newman (2006) sebagaimana dirujuk Wunarlan (2011) bahwa pelayanan dan akses terhadap infrastruktur publik memiliki hubungan yang sangat erat dengan jumlah dan kepadatan penduduk, wilayah layanan dan sebanding dengan skala ekonomi suatu kota, sehingga hal ini akan berdampak kepada kualitas layanan yang akan diterima suatu masyarakat perkotaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga September dengan mengambil obyek penelitian adalah penduduk dan fasilitas kota di Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa time series 2012 sampai dengan 2021 yang dirilis oleh BPS kabupaten Boalemo dan data primer yang dikumpulkan dari survey lapangan.

Adapun data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis regresi linear sederhana lalu dideskripsikan guna memperoleh gambaran yang holistik tentang kebutuhan dan ketersediaan fasilitas kota bagi penduduk.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan dan penambahan penduduk mengindikasikan bahwa kota tersebut tumbuh dan berkembang. Konsekuensi pertumbuhan penduduk adalah bertambahnya akan kebutuhan ruang dan lahan untuk menampung aktivitas atau kegiatan penduduk serta kebutuhan fasilitas kota. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 hingga tahun 2021 sebesar 2,03%.

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Boalemo pada tahun 2012 dan tahun 2021 berjumlah 131.732 jiwa dan 145.868 jiwa dengan rerata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,08%. Rerata tingkat kepadatan penduduk sebesar 79,65 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kota Tilamuta yakni 159,63 jiwa/km² dan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Paguyaman Pantai yakni 71,48 jiwa/km². Secara eksplisit, hasil analisis regresi tersebut mengindikasikan bahwa kepadatan penduduk yang tinggi selalu dibarengi dengan aktivitas penduduk yang tinggi pula dengan

berbagai permasalahan pelayanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai fasilitas kota yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan penduduk kota.

Fasilitas Pendidikan

Jumlah penduduk di Kabupaten Boalemo yang tergolong kelompok usia sekolah berjumlah 37,64% (BPS 2021). Pada tahun 2030 dan 2040, diperkirakan jumlah penduduk kelompok usia sekolah akan mengalami kenaikan sebesar 25,46% dan 36,39% dengan asumsi pertumbuhan penduduk sebesar 2,65% per tahun. Tentunya jumlah penduduk usia sekolah yang cukup tinggi ini membutuhkan fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah beserta unsur penunjang yang cukup banyak. Tingginya jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Boalemo, mengharuskan pemerintah maupun masyarakat (swasta) untuk menyediakan fasilitas pendidikan mulai dari gedung sekolah Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas.



Gambar 1. Fasilitas Pendidikan dan Aktivasnya Di Kabupaten Boalemo

Hasil analisis regresi linear sederhana dengan tingkat signifikan (α) sebesar 0,268, secara eksisting ketersediaan fasilitas pendidikan khususnya Taman Kanak-Kanak di setiap kecamatan sangat bervariasi. Pada tahun 2030, terdapat tiga kecamatan yang memiliki fasilitas sekolah Taman Kanak-Kanak yang cukup tinggi untuk menampung peserta didik yakni Kecamatan

Paguyaman, dan Kecamatan Wonosari (25 dan 15 sekolah), dan Kecamatan Tilamuta (19 sekolah), sedang fasilitas sekolah Taman Kanak-Kanak yang cukup rendah berada pada tiga kecamatan yakni Kecamatan Paguyaman Pantai, Kecamatan Mananggu serta Kecamatan Botumoito. Secara rerata ketersediaan fasilitas sekolah Taman Kanak-Kanak sangatlah berlebihan karena pada tahun 2030 dan 2040 ditiga kecamatan tersebut hanya membutuhkan fasilitas sekolah Taman Kanak-Kanak sebanyak 292 dan 572 sekolah (Kecamatan Paguyaman), 152 dan 291 sekolah (Kecamatan Tilamuta) serta 134 dan 254 sekolah (Kecamatan Wonosari). Secara rerata terdapat kelebihan fasilitas sekolah Taman Kanak-Kanak sebanyak 275 sekolah. Disisi lain, Kecamatan Botumoito dan Kecamatan Dulupi masih kekurangan fasilitas sekolah Taman Kanak-Kanak dan secara rerata masih membutuhkan fasilitas sekolah Taman Kanak-Kanak sebanyak 50 sekolah. Sedang Kecamatan Paguyaman Pantai meskipun tergolong kecamatan yang memiliki failitas sekolah Taman Kanak-Kanak yang minim namun sesungguhnya ketersediaan fasilitas sekolah Taman Kanak-Kanak di kecamatan ini telah melebihi dari kebutuhan failitas sekolah Taman Kanak-Kanak.

Keberadaan fasilitas pendidikan khususnya gedung sekolah dasar mengalami *over facilities*, kecuali Kecamatan Paguyaman berjumlah 7 gedung (2030) dan 5 gedung (2040) dan Kota Tilamuta berjumlah 7 gedung (2030) dan 4 gedung (2040). Rerata ketersediaan fasilitas pendidikan berjumlah 14 gedung (2030) dan 17 gedung (2040) sedang fasilitas pendidikan yang dibutuhkan berjumlah 10 gedung (2030) dan 12 gedung (2040).

Demikian halnya pada penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan untuk tingkat sekolah menengah baik menengah pertama maupun atas juga terjadi *over facilities*, dimana secara rerata keberadaan jumlah fasilitas pendidikan untuk tingkat sekolah menengah baik menengah pertama maupun atas cenderung sama yakni 8 gedung di 2030 dan 2040, sedang tingkat kebutuhan jumlah fasilitas gedung sekolah yakni 8 gedung (2030) dan 10 gedung (2040). Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Boalemo dalam penyediaan pelayanan fasilitas pendidik agar tidak terjadi *over facilities* dan pemborosan anggaran terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang dengan dukungan sumber daya yang kredibel.

Tabel 1. *Prediksi Rerata Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Boalemo*

No	Jenjang Pendidikan	Ketersediaan Fasilitas Pendidikan		Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	
		2030	2040	2030	2040
1	Taman Kanak-Kanak	315	328	11	13
2	Sekolah Dasar	104	107	8	10
3	Sekolah Menengah Pertama	25	35	2	3
4	Sekolah Menengah Atas	14	15	2	3

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Fasilitas Ekonomi

Salah satu fasilitas ekonomi yang vital adalah pasar. Keberadaanya sangat penting sebagai media untuk menjual dan membeli berbagai hasil produk pertanian, industri dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian. Pasar juga berperan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Kondisi bangunan pasar yang terdapat di Kabupaten Boalemo secara garis besar terbagi dua, yakni pasar permanen dan pasar non permanen. Keberadaan pasar dimaksudkan untuk memberikan pelayanan ekonomi dalam skala lokal dan keberadaanya tersebar merata di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Boalemo. Hasil analisis regresi linear dengan

tingkat signifikan (α) sebesar 0,347 memprediksi bahwa kondisi eksisting ketersediaan dan kebutuhan fasilitas pasar cenderung berimbang meskipun terdapat beberapa kecamatan pada tahun 2030 dan 2040 diprediksi mengalami penyusutan atau hilangnya fasilitas pasar seperti Kecamatan Paguyaman Pantai, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Botumoito, dan Kecamatan Mananggu. Keadaan ini disinyalir karena kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang kurang baik, ketidakmampuan dalam bersaing antar pedagang, aksesibilitas ke dan dari pasar yang sangat rendah serta buruknya fasilitas penunjang pasar seperti sanitasi, air bersih, dan listrik sehingga mengurangi minat pedagang untuk membuka lapak dagangannya pada wilayah tersebut. Keadaan ini memaksa masyarakat di wilayah tersebut dalam pemenuhan kebutuhan harian mereka untuk berbelanja di pasar kecamatan tetangga terdekat yang memiliki akses yang baik.

Secara umum perekonomian Kabupaten Boalemo selama tiga tahun terakhir memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,03% per tahun dan memiliki *income* perkapita sebesar Rp. 24.26 juta serta laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,60% per tahun (BPS, 2023). Ketiga parameter ini menjadi indikator bagi dunia perbankan untuk membuka cabangnya di Kabupaten Boalemo disamping jumlah penduduk yang cukup tinggi sebagai pangsa pasar yang potensial. Perbankan memiliki peran sebagai penghimpun, penyalur dana dari masyarakat serta memiliki peran sentral dalam kegiatan perekonomian disuatu wilayah.

Beberapa perbankan mencoba peruntungan untuk mendapatkan nasabah dengan membuka cabangnya di wilayah Kabupaten Boalemo. Perbankan sebagai salah satu fasilitas perekonomian yang bertujuan memberikan pelayanan ekonomi dalam skala wilayah, tahun 2023 diperkirakan secara rerata cabang perbankan tersebar hampir merata di setiap ibukota kecamatan, kecuali Kota Tilamuta, Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari. Di ketiga kecamatan ini, jumlah perbankan yang beroperasi cukup banyak yakni Kota Tilamuta terdapat 11 cabang perbankan (2030) dan 14 cabang perbankan (2040), Kecamatan Paguyaman terdapat 7 cabang perbankan (2030) dan 11 cabang perbankan (2040) serta Kecamatan Mananggu terdapat 5 cabang perbankan (2040) dan 9 cabang perbankan (2040). Kondisi ini sangat kontadiksi dengan kebutuhan fasilitas perbankan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah penduduk hanya terdapat dua kecamatan yang memenuhi persyaratan di buka cabang perbankan yakni Kecamatan Paguyaman untuk bagian Timur dan Kota Tilamuta untuk bagian Barat dari wilayah Kabupaten Boalemo. Kondisi ini akan menyebabkan kompetisi yang tinggi pada dunia perbankan di Kabupaten Boalemo dalam menjangkau nasabah dan penghimpunan serta penyaluran dana. Keadaan tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat, dimana perbankan akan memberikan fasilitas pelayanan prima kepada setiap calon nasabahnya.

Disamping perbankan, Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan suatu lembaga yang dipercaya dalam menghimpunan dan penyaluran dana masyarakat serta menstabilkan harga produk hasil pertanian pada tingkat petani dan nelayan. KUD merupakan lembaga non bank yang memiliki fungsi sosial dan berperan untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajat ekonomi masyarakat. Hasil analisis regresi memprediksi rerata ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi khususnya KUD sebanyak 12 unit (2030) dan 15 unit (2040). Diprediksi pada tahun 2030 dan 2040, fasilitas pelayanan ekonomi khususnya KUD tersebar hampir merata di setiap kecamatan

kecuali Kecamatan Paguyaman Pantai dan Kecamatan Dulupi akan mengalami defisit fasilitas pelayanan ekonomi. Sementara rerata kebutuhan fasilitas pelayanan ekonomi khususnya KUD sebanyak 12 unit (2030) dan 13 unit (2040). Adanya selisih antara ketersediaan dan kebutuhan fasilitas menunjukkan *over facilities* sehingga diperlukan perencanaan yang matang guna pengoptimalan fasilitas.

Wilayah Kabupaten Boalemo memiliki beberapa obyek wisata, antraksi budaya dan wisata kuliner seperti taman laut Pantai Ratu, perkampungan suku Bajo, Pulau Bolihutuo dan Wisata Tapadaa, makanan *sea food* dan sebagainya. Obyek wisata ini banyak menarik perhatian wisatawan baik wisatawan domestik maupun manca negara untuk melakukan *diving, snorkling, hicking*, atau *traveling* menikmati keindahan panorama alam yang asri. Tingginya kunjung wisatawan membutuhkan fasilitas berupa hotel dan rumah makan. Kedua fasilitas ini cukup vital dalam menunjang obyek wisata dan kunjungan wisata. Hotel yang beroperasi di Kabupaten Boalemo masuk dalam kategori hotel kelas melati.

Hasil analisis regresi linear memprediksikan ketersediaan fasilitas hotel (kamar hotel) terkonsentarsi di empat kecamatan yakni Kecamatan Botumoito di bagian Barat Kabupaten Boalemo sebanyak 64 kamar hotel (2030) dan 100 kamar hotel (2040), Kota Tilamuta sebanyak 75 kamar hotel (2030) dan 150 kamar hotel (2040), Kecamatan Paguyaman sebanyak 85 kamar hotel (2030) dan 173 kamar hotel (2040), Kecamatan Mananggu sebanyak 10 kamar hotel (2030) dan 25 kamar hotel (2040) di bagian Tengah Kabupaten Boalemo. Ketersediaan fasilitas perhotelan (kamar hotel) terkonsentrasi di empat kecamatan yang disebutkan diatas karena kedekatan terhadap obyek wisata sehingga memberikan akses yang baik bagi pelancong untuk mencapai suatu obyek wisata. Akan tetapi hasil analisis regresi linear terhadap prediksi kebutuhan fasilitas hotel (kamar hotel) cukup rendah. Kebutuhan fasilitas hotel (kamar hotel) menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan terhadap ketersediaan fasilitas hotel (kamar hotel). Kebutuhan fasilitas hotel hanya terdapat Kota Paguyaman dan Kecamatan Botumoito masing-masing sebanyak 65 kamar hotel pada tahun 2030.

Adapun fasilitas penunjang wisata kuliner yakni rumah makan ataupun cafetaria. Diprediksi Kota Tilamuta sangat dominan dalam penyediaan fasilitas rumah makan atau cafetaria yakni sebanyak 63 unit (2030) dan 75 unit (2040) dan Kecamatan Paguyaman Pantai merupakan kecamatan yang sangat minim akan fasilitas rumah makan atau cafetaria yakni 10 unit pada tahun 2030, hal ini disebabkan rendahnya akses menuju wilayah tersebut dan Kecamatan Paguyaman Pantai bukan menjadi daerah tujuan wisata di Kabupaten Boalemo. Secara rerata diprediksi kebutuhan akan fasilitas rumah makan atau cafetaria di tahun 2030 sebanyak 10 unit dan di tahun 2040 sebanyak 15 unit. Jika dilihat dari prediksi ketersediaan fasilitas hotel hotel (kamar hotel) serta rumah makan atau cafetaria maka akan terjadi persaingan yang sangat ketat dalam memperebutkan pangsa pasar.





Gambar 2. Beberapa Fasilitas Ekonomi di Kabupaten Boalemo

Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan fasilitas penunjang yang sangat penting dalam mendidik dan menempah moral serta etika komunal masyarakat kota. Keberadaan fasilitas peribadatan di Kabupaten Boalemo sangat dominan jika dibandingkan dengan fasilitas kota yang lain.



Gambar 3. Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Boalemo

Kondisi eksisting fasilitas peribadatan di Kabupaten Boalemo yang terdiri dari masjid berjumlah 366 unit, gereja berjumlah 19 unit, dan pura berjumlah 21 unit. Secara rerata prediksi dari analisis regresi linear dengan tingkat signifikan sebesar 0,236 menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas peribadatan berupa masjid sebanyak 35 unit (2030) dan 49 unit 2040), gereja sebanyak 5 unit (2030) dan 7 unit (2040), pura sebanyak 5 unit (2030) dan 7 unit (2040). Di sisi lain kebutuhan fasilitas peribadatan berupa sebanyak 5 unit (2030) dan 7 unit (2040) gereja, pura dan vihara sebanyak 2 unit (2030) dan 3 unit (2040). Jika dilihat dari ketersediaan dan kebutuhan fasilitas peribadatan yang memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Boalemo terdapat selisih yang

signifikan. Dimana jumlah ketersediaan fasilitas peribadatan lebih tinggi dari jumlah kebutuhan peribadatan sehingga telah mencukupi dan memenuhi kebutuhan peribadatan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Boalemo tidak perlu lagi menambah anggaran untuk fasilitas peribadatan karena *over facility*.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan kebutuhan infrastruktur atau fasilitas publik kota tidak berimbang, dimana ketersediaan fasilitas pendidikan (gedung sekolah), fasilitas ekonomi (pasar, bank, KUD, Hotel dan Rumah Makan), dan fasilitas peribadatan (masjid, gereja dan pura) sudah melebihi tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas tersebut sehingga penambahan atau pembangunan fasilitas-fasilitas baru akan menyebabkan pemborosan anggaran serta tingkat penggunaan atau pemanfaatannya akan kurang optimal.
2. Fasilitas kesehatan yang sangat *urgent* bagi masyarakat di Kabupaten Boalemo perlu diteliti lebih lanjut.
3. Infrastruktur transportasi harus mendapat perhatian yang serius dari Pemkab Boalemo untuk memudahkan akses masyarakat ke fasilitas-fasilitas publik kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R., 2015. Teori Pertumbuhan Kota. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Clarke, K.C., Hoppen, S., and Gaydos, L., 1995. A Self-Modifying Cellular Automaton Model of Historical Urbanization in the San Francisco Bay Area. *Journal of Environment and Planning B: Planning and Design* 1997, volume 24, pages 247 – 261. New York. Diakses : 8 Januari 2014.
- Ernawi, Imam. S., 2010. Morfologi-Transformasi Dalam Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan. Makalah Seminar yang disampaikan dalam seminar Program Pascasarjana-Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gallion, A.B dan Eisner, S., 1980. *The Urban Pattern : City Planning and Design*. D.Van Nostrand Company. New York.
- Heryanto, B., 2011. Roh dan Citra Kota : Peran Perancangan Kota Sebagai Kebijakan Publik. Brilian Internasional. Surabaya.
- Irwan, Dj. Z. 2008. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Bumi Aksara. Jakarta.
- Karyono, H. Tri, 2013. *Arsitektur dan Kota Tropis Dunia Ketiga : Suatu Bahasan Tentang Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Kuffer, M., 2013. *Measuring Urban Growth Patterns In Developing Countries Using Remote Sensing and Spatial Matrices: A Case Study in Kampala, Uganda*. Dissertation. University of Twente. Holland.

- Nasution, T.B.U., Badaruddin dan Supriadi., 2014. Peran Kota Kecil Terhadap Perkembangan Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekonom*, Vol 17, No 1, Januari 2014. USU. Medan.
- Pamekas, R., 2013. *Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Permukiman*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Rukmana, N. 2002. *Pelatihan Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan : Modul Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan*. PT. Saranabudi Prakarsa. Jakarta.
- Sadyohutomo, M., 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soetomo, Sugiono., 2009. *Urbanisasi dan Morfologi : Proses perkembangan peradaban dan wadah ruang fisiknya menuju ruang kehidupan yang manusiawi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- SNI 03-1733-2004. *Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan*.
- Suryo, D., 2004. *Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900 – 1990*. The 1st International Conference on Urban History. Surabaya.
- Wunarlan, Irwan., 2011. *Analisis Wilayah Untuk Optimasi Pelayanan Infrastruktur Publik Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Kel. Padebuolo Dan Kel Moodu)*. *Jurnal Teknik* No. 1 Vol. 9. Fakultas Teknik-Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Yunus, S. Hadi., 2008. *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.